



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

## POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TA 2017

Surabaya, 30 November 2016



RAPAT KOORDINASI PENCERMATAN RKA KL  
TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI DAN  
KAB/KOTA SE JAWA TIMUR



# PENYUSUNAN ANGGARAN KPU



1

UU No. 17/2003  
tentang Keuangan  
Negara  
(pasal 12 ayat 1) :  
Penyusunan  
Rancangan APBN  
berpedoman pada  
Rencana Kerja  
Pemerintah dalam  
rangka mewujudkan  
tercapainya tujuan  
bernegara.

2

PP No. 90/2010  
tentang Penyusunan  
Rencana Kerja dan  
Anggaran K/L  
(pasal 9 ayat 1)  
Menteri Keuangan  
dalam rangka  
penyusunan RKA-KL  
menetapkan Pagu  
Anggaran K/L dengan  
berpedoman kapasitas  
fiskal, besaran pagu  
indikatif, Renja KL dan  
memperhatikan hasil  
evaluasi kinerja K/L

3

Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor  
143/PMK.02/2015  
tentang Petunjuk  
Penyusunan dan  
Penelaahan  
Rencana Kerja dan  
Anggaran  
Kementerian  
Negara/Lembaga

# Identifikasi kelemahan manajemen keuangan pemerintah (sebelum reformasi)



1

## Kelemahan di bidang Penganggaran :

- ✓ Fungsi perencanaan yang belum tegas benang merahnya dengan penganggaran;
- ✓ Anggaran yang berorientasi pada input, bukan output atau outcomes;

2

## Kelemahan di bidang Pelaksanaan Anggaran :

Fungsi financial management yang tidak terpadu, dan fungsi operasional yang belum optimal (*let the managers manage*);

3

## Kelemahan Akuntansi dan Pertanggungjawaban :

- ✓ Tanggung jawab kementerian thdp penggunaan anggaran belum cukup tegas;
- ✓ Fungsi pemeriksaan yang kurang efektif dan tumpang tindih.

## REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH

Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran;

Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran;

Reformasi bidang Perbendaharaan, Sistem Penerimaan & Pembayaran;

Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang, Barang Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah;

Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban;

Reformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem Pengendalian.

# Semangat "Good Governance"



Pasal 3 ayat (1) Undang–Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*



# Semangat "Good Governance"



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA/PB menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Pasal 14 (1,2)
2. Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2010 mengamanatkan :
  - a. Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan KPJM, penganggaran terpadu, dan PBK , serta menggunakan instrumen Indikator Kinerja, Standar Biaya, dan Evaluasi Kinerja; Pasal 5 (1,3)
  - b. Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan, paling sedikit terdiri atas tingkat Keluaran, capaian Hasil, tingkat efisiensi, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, dan realisasi penyerapan anggaran; Pasal 19 (1,2)

# PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

20  
nn

5  
nn

n



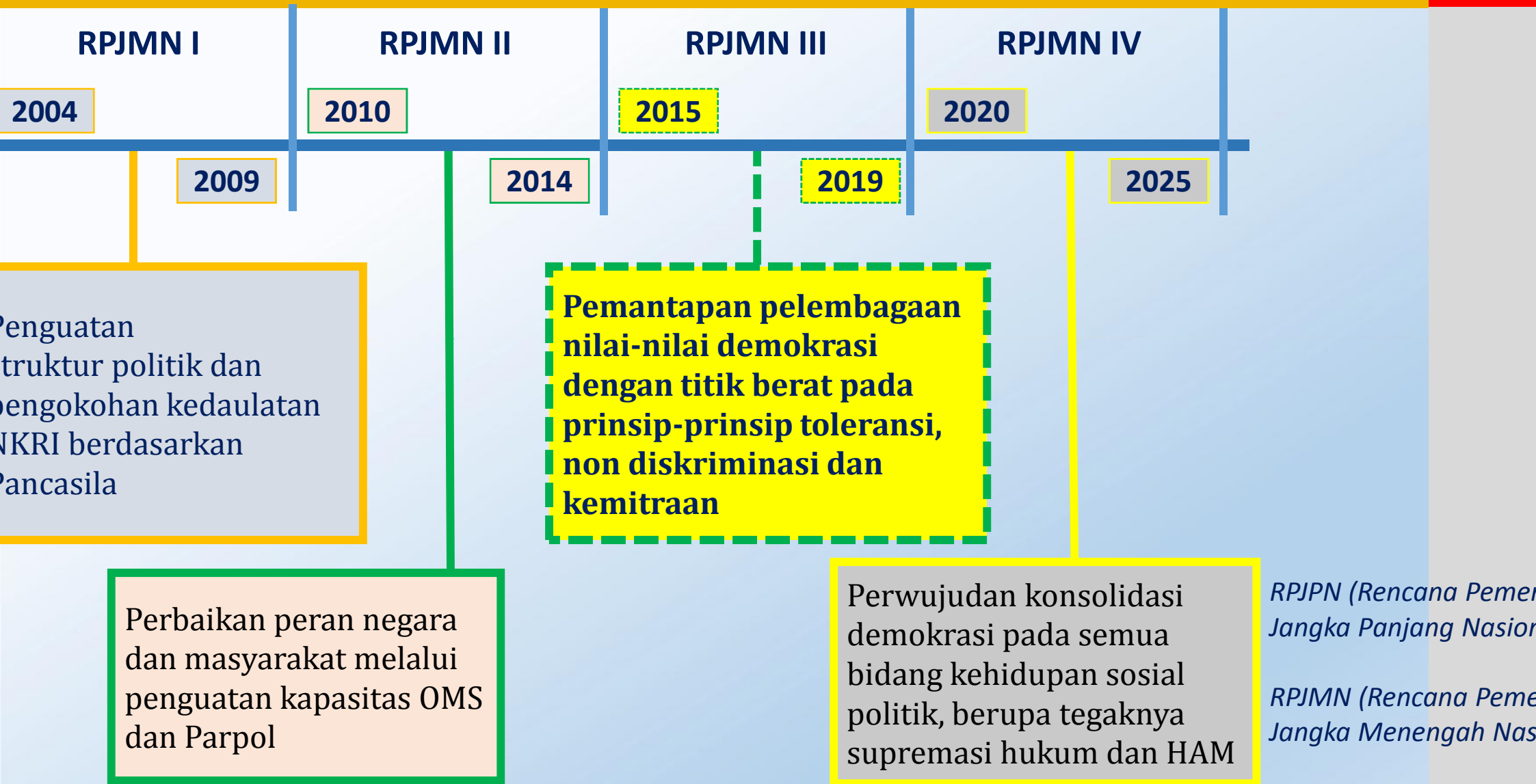
Untuk mencapai



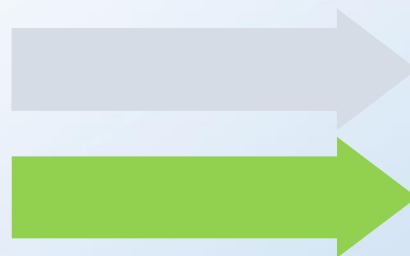
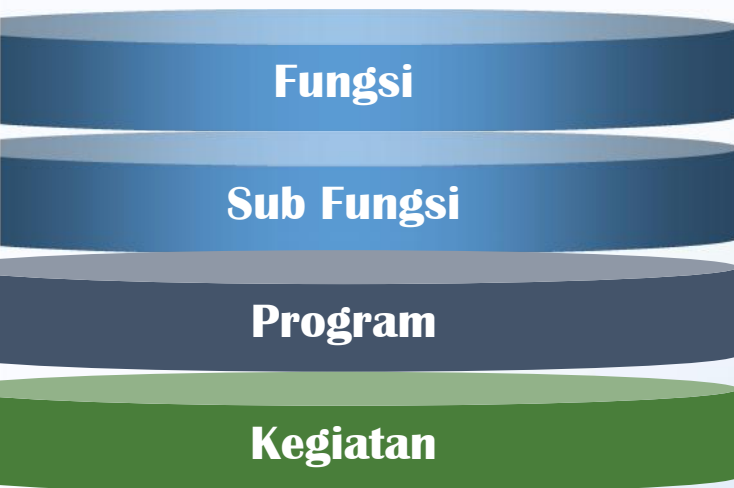
"Performance-based budget"

1) : dijabarkan 2) : dirangkum 3) : indikasi pendanaan 4) : kepastian pendanaan 5) : menghasilkan 6) : proyeksi ke depan

# TAHAPAN DAN PRIORITAS RPJPN 2005-2025

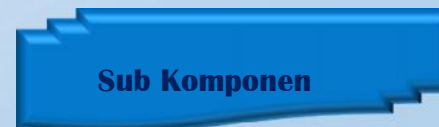


# STRUKTUR ANGGARAN

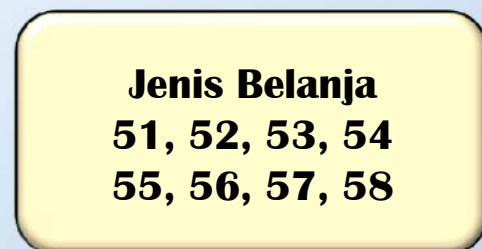


**Indikator Kinerja  
Utama/IKU**

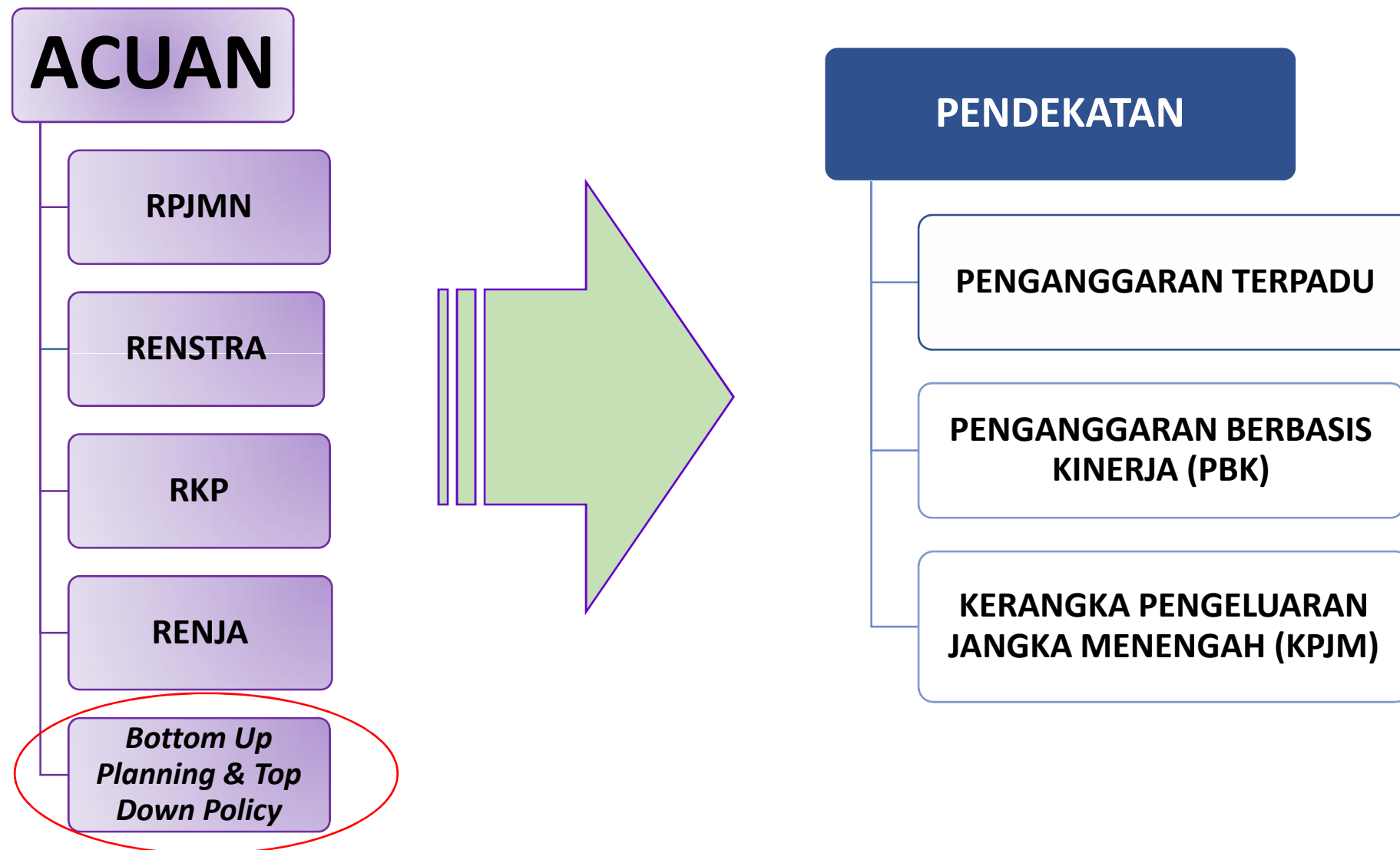
**Indikator Kinerja  
Kegiatan/IKK**



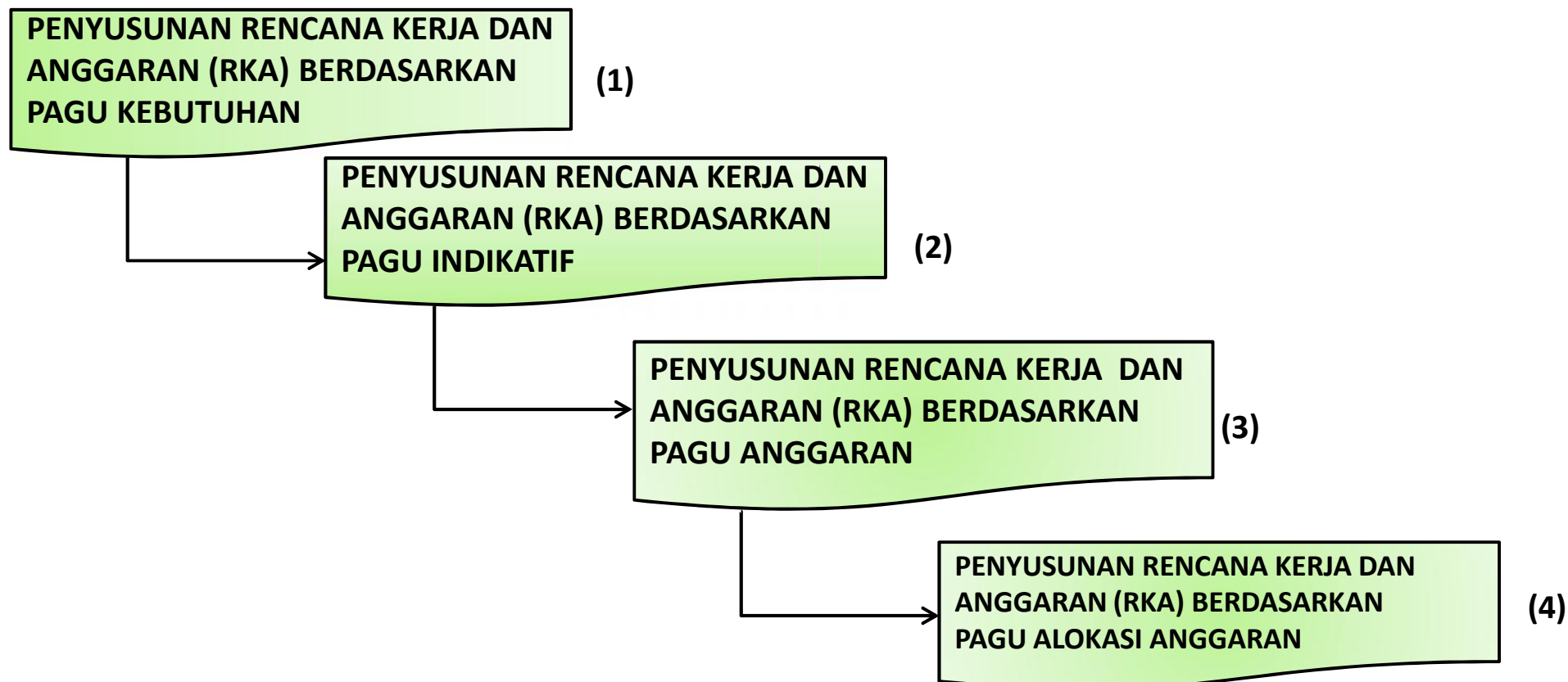
**Proses Pencapaian Output**



# PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

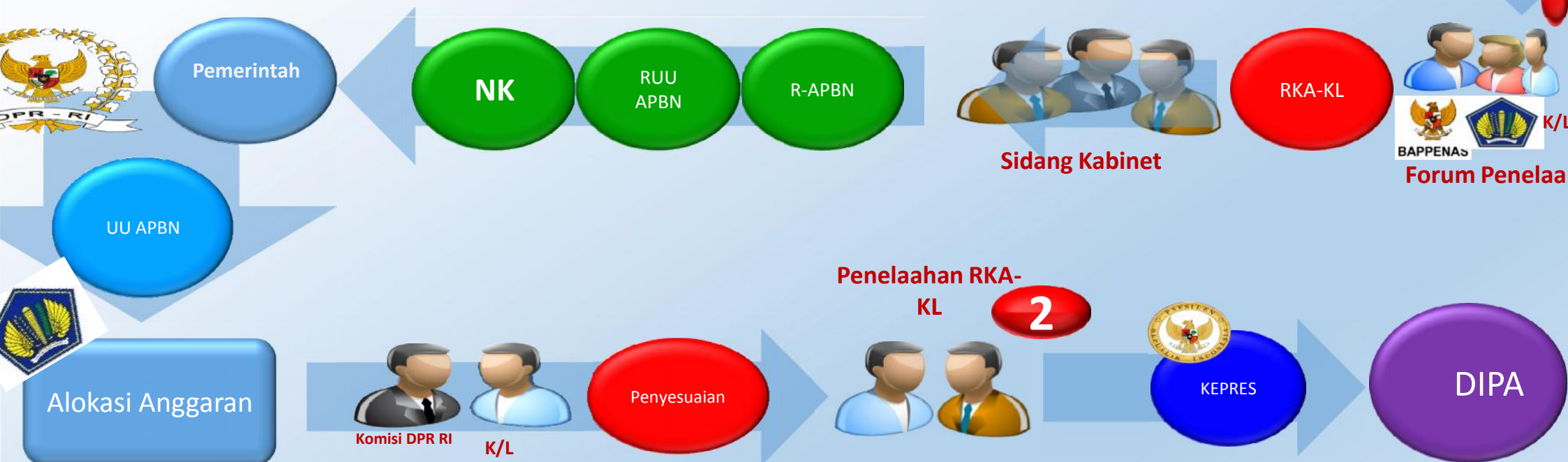


# MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

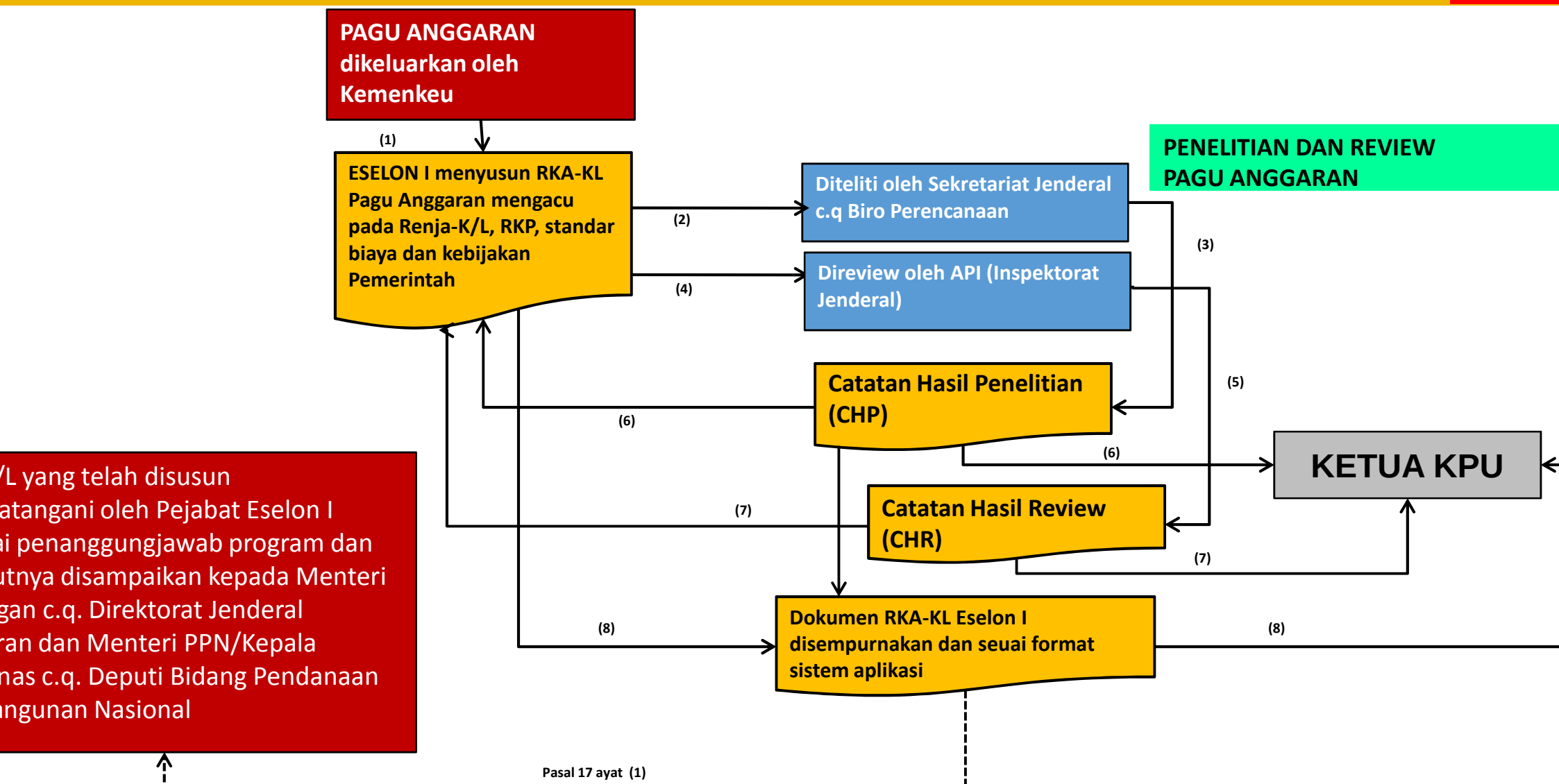




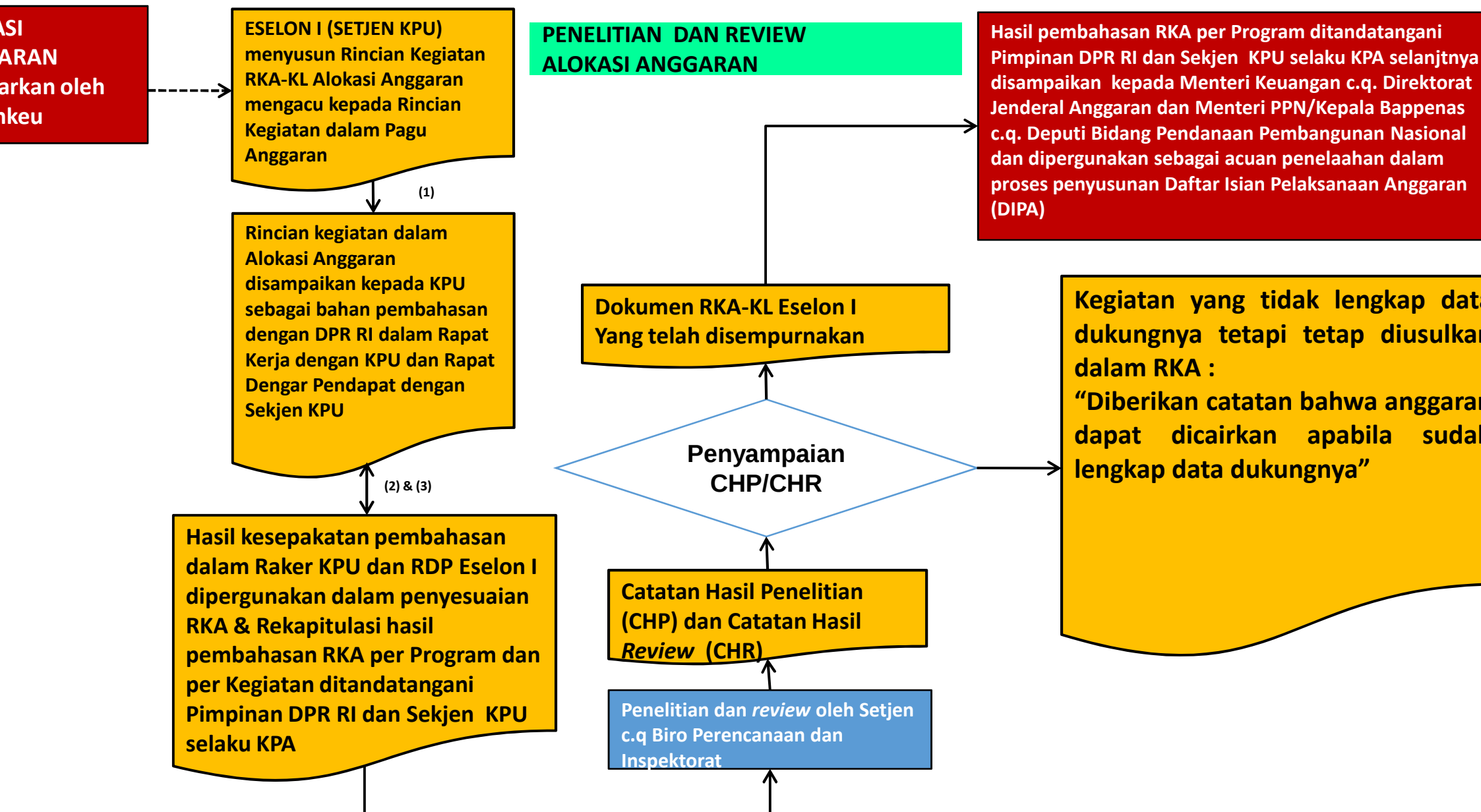
## ~ PROSES PENGESAHAN DIPA ~



# Diagram penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran



# Diagram penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran



# RENSTRA KOMISI PEMILIHAN UMUM 2015-2019



isi

***menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil***

**Keputusan KPU  
No. 63/Kpts/KPU/2015**

## Misi

- 1 membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
- 2 menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3 meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4 meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5 memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- 6 meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7 mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel

# Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019



| TUJUAN                                                                                                                                  | SASARAN STRATEGIS                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu               | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan |
| Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia                                      | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis |

# KERANGKA PENDANAAN





# Prioritas Sasaran Program

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA  
KPU (076.01.01) :

- Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya;
- Terwujudnya data pemilih yang terkini;
- Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
- Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
- Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KPU :

- Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;

# Prioritas Sasaran Program



## PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK (076.01.06)

- Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal.

# Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU (076.01.01)



*Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut antara lain adalah :

- a. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI;
- b. menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- c. menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- d. menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI;
- e. menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
- f. menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

## Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02)



*Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi Komisi Pemilihan Umum.

**Kebijakan** yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

# Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Memperbaiki Proses Politik (076.01.06)



*Outcome* yang diharapkan dalam program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Kebijakan** yang akan dilaksanakan dalam program tersebut antara lain :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)

erangka Pendanaan KPU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015  
entang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 :

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator Kinerja    | Alokasi (dalam juta rupiah) |                |                |                |                | Jumlah         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                                                              | 2015                        | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |                |
| 076.01.01          | Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU              | 201.052                     | 381.340        | 351.967        | 317.441        | 332.330        | 1.549.6        |
| 076.01.02          | Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU                | 100.000                     | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 500.0          |
| 076.01.06          | Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | 97.031                      | 180.900        | 300.428        | 251.819        | 258.117        | 1.088.2        |
|                    | <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>398.083</b>              | <b>662.240</b> | <b>752.395</b> | <b>669.260</b> | <b>690.447</b> | <b>3.137.9</b> |

Belanja Non Operasional TA. 2016 sebesar Rp300.069 (45%)

Belanja Non Operasional TA. 2017 sebesar Rp262.146 (35%)

Perbandingan Alokasi RPJMN dengan Alokasi Riil :



| Program / Kegiatan | Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator Kinerja    | Alokasi (dalam juta rupiah) |                |                |                |                |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                    |                                                                              | 2015                        |                | 2016           |                | 2017           |              |
|                    |                                                                              | RPJMN                       | RIIL           | RPJMN          | RIIL           | RPJMN          | RIIL         |
| 076.01.01          | Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU              | 201.052                     | 191.051        | 381.340        | 212.569        | 351.967        | 170.0        |
| 076.01.02          | Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU                | 100.000                     | 100.000        | 100.000        | 7.500          | 100.000        | 20.0         |
| 076.01.06          | Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | 97.031                      | 97.031.        | 180.900        | 80.000         | 300.428        | 72.1         |
|                    | <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>398.083</b>              | <b>388.082</b> | <b>662.240</b> | <b>300.069</b> | <b>752.395</b> | <b>262.1</b> |

# KRONOLOGIS ANGGARAN TAHUN 2017

## PAGU KEBUTUHAN

Am rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran 2017, dengan berpedoman pada Perpres 2 tahun 2015, tra KPU 2015-2019 serta surat Menteri Keuangan Nomor S-118/AG/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang mintaan Data terkait Persiapan pelaksanaan Reviu Angka Dasar dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2017, telah menyampaikan Surat Nomor 52/KPU/II/2016 tanggal 4 Febuari 2016 tentang Penyampaian Data terkait siapan Reviu Angka Dasar dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar Rp3.060.200.000.000,-

## PAGU INDIKATIF

uai surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu Nomor 0163/M.PPN/05/2016 S-378/MK.02/2016 ggal 13 Mei 2016 tentang RKP Tahun 2017 dan Pagu Indikatif K/L TA 2017, pada tahun 2017 KPU memperoleh ggaran sebesar Rp1.931.150.800.000,-

# KRONOLOGIS ANGGARAN TAHUN 2017

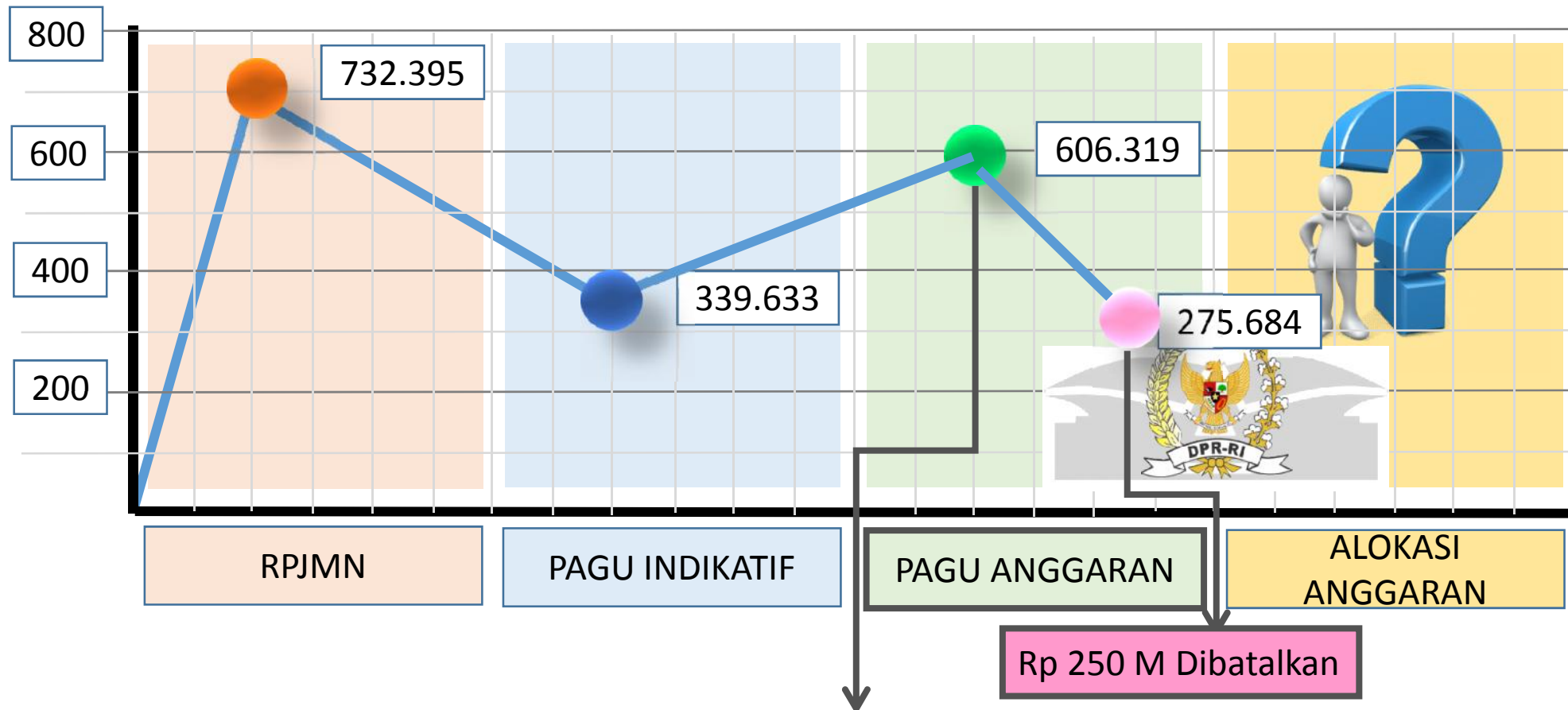
## PAGU ANGGARAN

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang pengalokasian Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga KPU dan Penyelesaian RKA K/L TA 2017, KPU memperoleh Pagu Anggaran untuk TA 2017 sebesar Rp2.181.150.758.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp250.000.000.000,- untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2017, persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2018 serta persiapan Pemilu 2019 (kecuali anggaran kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019)

## PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN

Berdasarkan surat Menkeu no. S-635/MK.02/2016 tgl. 5 Agustus 2016, Perihal Penyesuaian Pagu Anggaran K/L TA 2017, dalam rangka penghematan, maka pagu anggaran KPU disesuaikan/dipangkas sebesar Rp330.635.328.000,- sehingga menjadi Rp1.850.515.430.000,-

# ALUR PAGU ANGGARAN KPU TA 2017 (Belanja Non Operasional)



Terdapat Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 250 M untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Serentak 2017 dan 2018 serta kebutuhan prioritas lainnya

Supervisi dan monitoring s  
pengelolaan  
anggaran hik  
Pilkada 2017  
101 Satker  
Rp50.84M

Persiapan,  
Supervisi dan  
monitoring s  
pengelolaan  
anggaran hik  
Pilkada 2018  
171 Satker (Provinsi, 115  
Kabupaten d  
Kota) Rp199

Verifikasi Pa  
Perseoranga  
Pemilu 2019  
sebesar Rp  
390,9M



# **OVERVIEW**

## **PAGU ALOKASI ANGGARAN**

### **KPU BA 076 TA 2017**



[Program.kpu@gmail.com](mailto:Program.kpu@gmail.com)

# PAGU ALOKASI ANGGARAN KPU TA 2017



| Kode   |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                      | Alokasi Anggaran<br>2017 |
|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KL     | Prog | Keg  |                                                                                                                                                                         |                          |
| 1      | 2    | 3    | 4                                                                                                                                                                       | 5                        |
| 76     | 01   |      | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU                                                                                                     | 1.758.369.158.000        |
| 76     | 1    | 3355 | Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU                                                                                    | 1.359.277.672.000        |
|        |      | 994  | Belanja pegawai operasional                                                                                                                                             | 1.331.277.672.000        |
|        |      |      | Belanja non operasional                                                                                                                                                 | 28.000.000.000           |
| 76     | 1    | 3356 | Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu                                                    | 12.000.000.000           |
| 76     | 1    | 3357 | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data                                                                                                                              | 59.000.000.000           |
| 76     | 1    | 3358 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian                                                                                                   | 33.500.000.000           |
| 76     | 1    | 3360 | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)                                                                                                          | 282.091.486.000          |
| 76     |      | 994  | Belanja barang operasional                                                                                                                                              | 257.091.486.000          |
|        |      |      | Belanja non operasional                                                                                                                                                 | 25.000.000.000           |
| 76     | 1    | 3361 | Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota                                                                      | 12.500.000.000           |
| 76     | 02   |      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU                                                                                                                   | 20.000.000.000           |
| 76     | 2    | 3362 | Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana                                                                                                                           | 20.000.000.000           |
| 76     | 06   |      | Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik                                                                                                    | 72.146.272.000           |
| 76     | 6    | 3363 | Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu. | 20.100.000.000           |
| 76     | 6    | 3364 | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.       | 52.046.272.000           |
| JUMLAH |      |      |                                                                                                                                                                         | 1.850.515.430.000        |

# PERBANDINGAN PAGU ALOKASI TA 2016 DAN TA 2017



Dalam Ribuan Rupiah

| URAIAN KEGIATAN                                                                                             | PROVINSI   |           | KABUPATEN/KOTA |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|
|                                                                                                             | 2016       | 2017      | 2016           | 2017       |
| 55 - Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU                   | 5.788.667  | 4.376.042 | 25.019.110     | 17.911.110 |
| 56 - Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Koordinasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu | 1.086.768  | 2.854.577 | 8.289.085      | 3.859.085  |
| 57 - Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data                                                             | 14.861.103 | 7.333.322 | 35.894.728     | 23.632.728 |
| 58 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian                                  | 11.174.998 | 4.465.929 | 4.251.526      | 3.220.526  |
| 59 - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)                                         | 5.453.709  | 1.723.161 | 13.345.480     | 7.920.480  |
| 51 - Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota     | 2.992.897  | 1.913.622 | 4.010.012      | 4.706.012  |

# PERBANDINGAN PAGU ALOKASI TA 2016 DAN TA 2017



Dalam Ribuan Rupiah

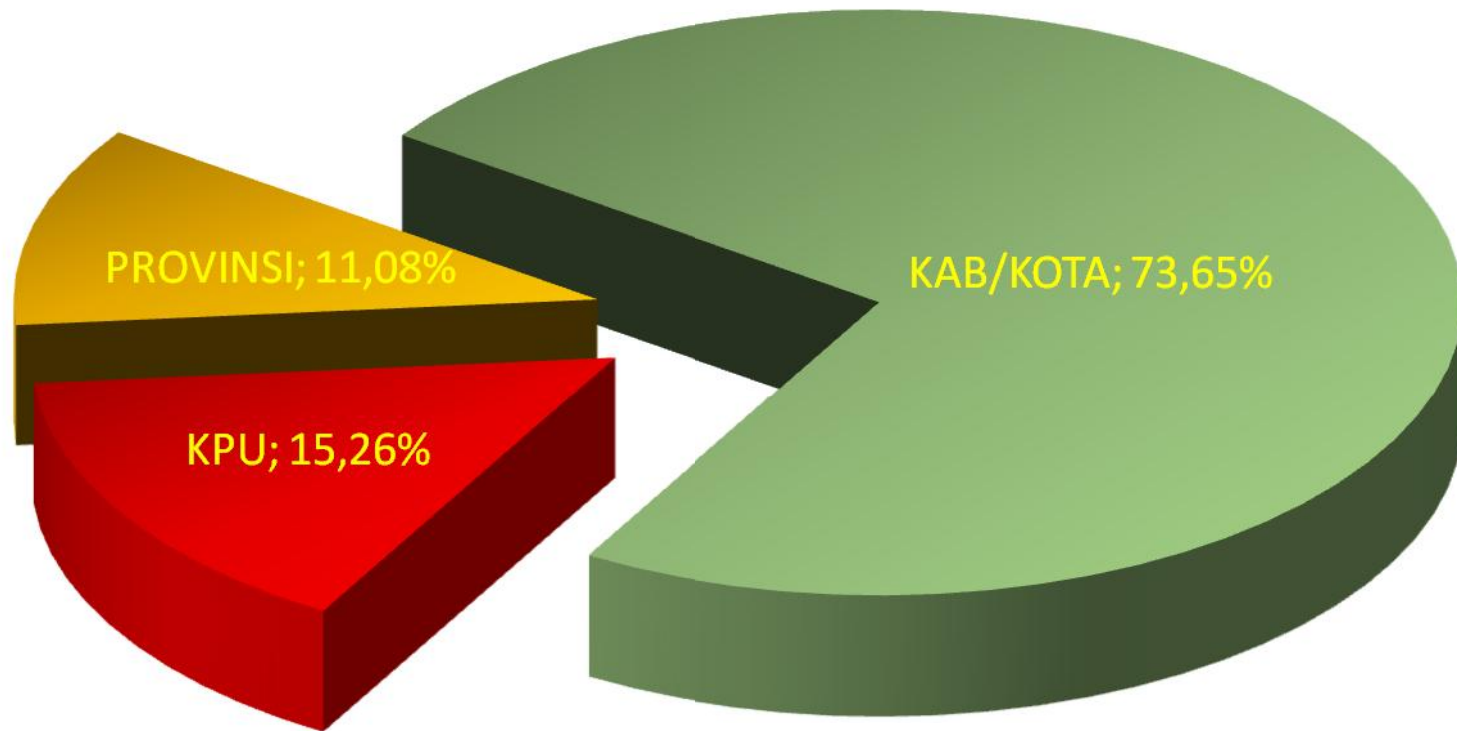
| URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                                             | PROVINSI   |           | KABUPATEN/KOTA |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | 2016       | 2017      | 2016           | 2017    |
| 52 - Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana                                                                                                                          | 0          | 2.574.850 | 1.351.795      | 10.545. |
| 53 - Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu | 5.662.003  | 3.879.544 | 13.464.372     | 3.834.  |
| 54 - Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih                                            | 24.631.859 | 9.017.206 | 43.056.868     | 15.931. |

# PERBANDINGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA KPU PUSAT, KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA TA 2017

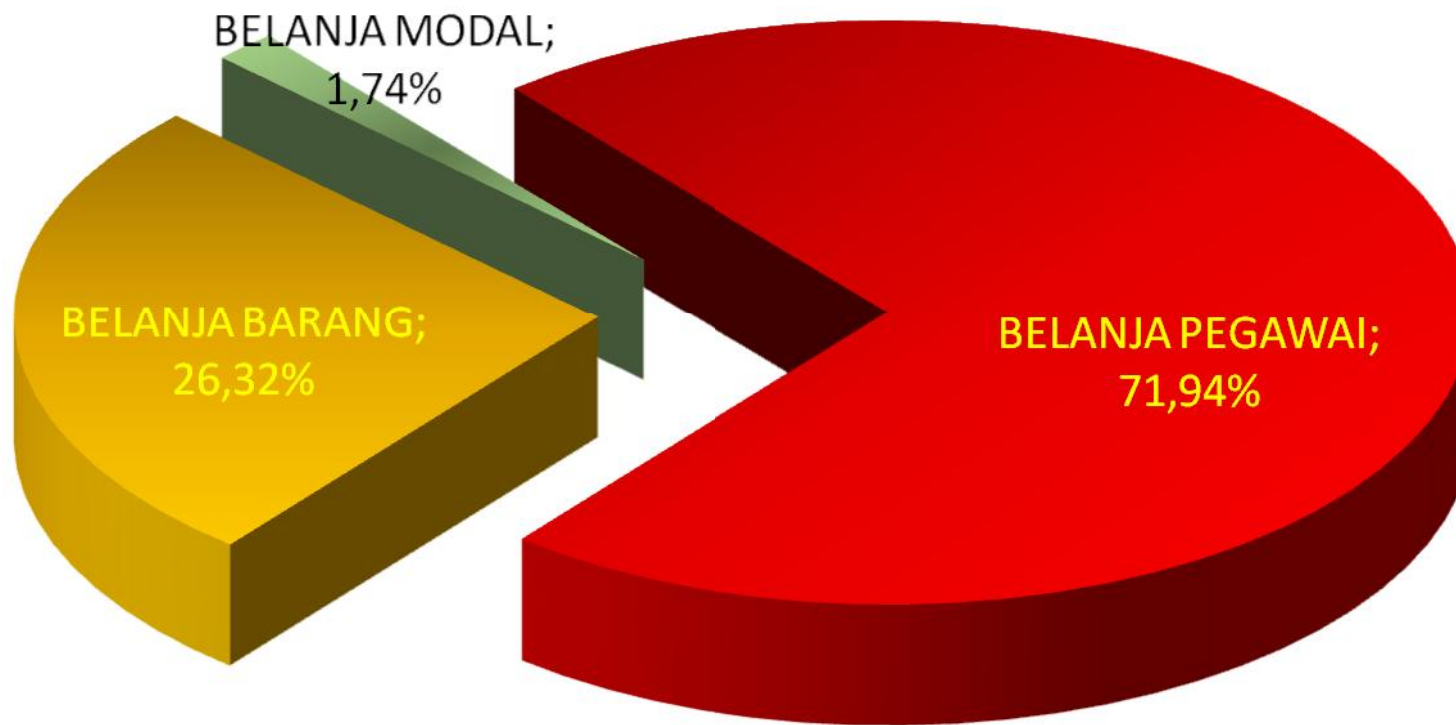


| SATUAN KERJA       | BELANJA PEGAWAI<br>(51) | BELANJA BARANG<br>(52) | BELANJA MODAL<br>(53) | JUMLAH            |         |
|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| KPU PUSAT (1)      | 122.306.385.000         | 153.107.600.000        | 7.066.830.000         | 282.480.815.000   | 15,32%  |
| KPU PROVINSI (34)  | 142.861.287.000         | 57.727.277.000         | 4.459.850.000         | 205.048.414.000   | 11,74%  |
| KPU KAB/KOTA (514) | 1.066.110.000.000       | 276.220.881.000        | 20.655.320.000        | 1.362.986.201.000 | 73,94%  |
| JUMLAH (549)       | 1.331.277.672.000       | 487.055.758.000        | 32.182.000.000        | 1.850.515.430.000 | 100,00% |
|                    | 71,94%                  | 26,32%                 | 1,74%                 | 100,00%           |         |

# Perbandingan Alokasi Anggaran KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota TA 2017



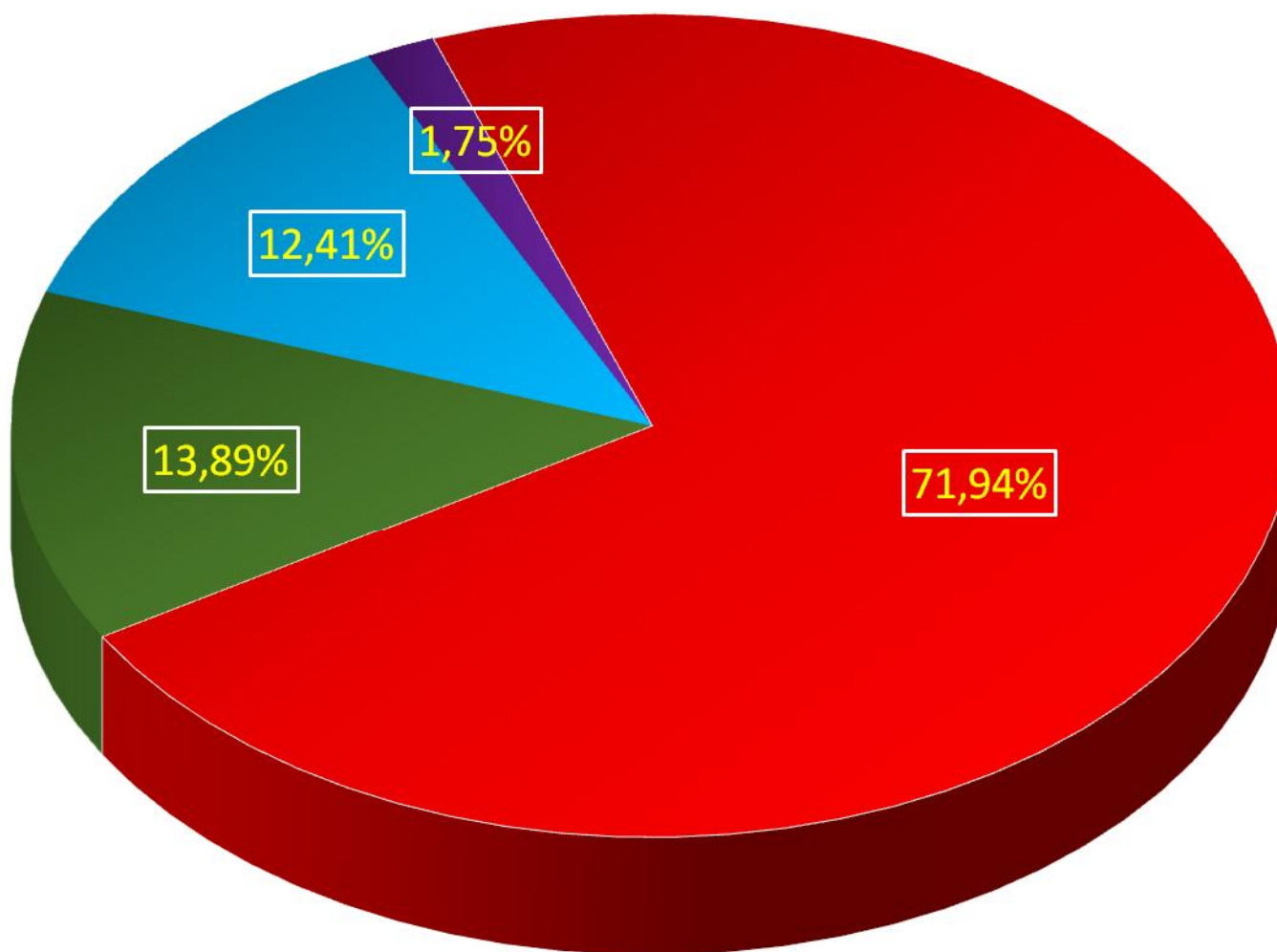
# Perbandingan Alokasi Anggaran per Jenis Belanja A 076 KPU TA 2017



# PAGU ALOKASI ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL DISANDINGKAN DENGAN BELANJA NON OPERASIONAL KPU TA 2017

| BELANJA OPERASIONAL           |                             | BELANJA NON OPERASIONAL     |                           | JUMLAH                      |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| PEGAWAI                       | BARANG<br>PERKANTORAN       | BARANG/JASA                 | MODAL                     |                             |
| 1.331.277.672.000<br>(71,94%) | 257.091.486.000<br>(13,89%) | 229.688.272.000<br>(12,41%) | 32.458.000.000<br>(1,75%) | 1.850.515.430.000<br>(100%) |
| 1.588.369.158.000<br>(85,83%) |                             | 262.146.272.000<br>(14,17%) |                           | 1.850.515.430.000<br>(100%) |

## Perbandingan Belanja Pegawai Operasional, Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional & Belanja Modal



■ BEL. PEGAWAI OPERASIONAL   ■ BEL. BARANG OPERASIONAL   ■ BELANJA NON OPERASIONAL   ■ BEL. MODAL

## OVER VIEW PAGU ALOKASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA KPU TA 2017

| KUN           | URAIAN                                                   | BELANJA PEGAWAI          |             | BELANJA BARANG         |             |  |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|--|
|               |                                                          | Rp.                      | %           | Rp.                    | %           |  |
| xxx           | Belanja Gaji Pokok PNS                                   | 385.370.476.000          | 28,95%      |                        |             |  |
| xxx           | Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)              | 945.907.196.000          | 71,05%      |                        |             |  |
| L11           | Belanja Keperluan Perkantoran                            |                          |             | 5.235.000              | 0,00%       |  |
| L15           | Honor Operasional Satuan Kerja                           |                          |             | 8.783.400.000          | 3,82%       |  |
| L19           | Belanja Barang Operasional Lainnya                       |                          |             | 38.000.000             | 0,02%       |  |
| L211          | Belanja Bahan                                            |                          |             | 16.252.855.000         | 7,08%       |  |
| L213          | Honor Output Kegiatan                                    |                          |             | 28.057.500.000         | 12,22%      |  |
| L219          | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                   |                          |             | 14.558.628.000         | 6,34%       |  |
| L311          | Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (ATK...) |                          |             | 19.747.650.000         | 8,60%       |  |
| L319          | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya                  |                          |             | 288.000.000            | 0,13%       |  |
| L331          | Belanja Jasa Konsultan                                   |                          |             | 1.603.851.000          | 0,70%       |  |
| L41           | Belanja Sewa                                             |                          |             | 7.489.710.000          | 3,26%       |  |
| L51           | Belanja Jasa Profesi                                     |                          |             | 3.287.700.000          | 1,43%       |  |
| L91           | Belanja Jasa Lainnya                                     |                          |             | 14.845.866.000         | 6,46%       |  |
| L29           | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                          |             | 195.000.000            | 0,08%       |  |
| L11           | Belanja perjalanan biasa                                 |                          |             | 70.187.006.000         | 30,56%      |  |
| L13           | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                      |                          |             | 3.544.610.000          | 1,54%       |  |
| L14           | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota        |                          |             | 31.024.594.000         | 13,51%      |  |
| L19           | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         |                          |             | 8.626.800.000          | 3,76%       |  |
| L219          | Belanja perjalanan lainnya - luar negeri                 |                          |             | 1.151.867.000          | 0,50%       |  |
| <b>JUMLAH</b> |                                                          | <b>1.331.277.672.000</b> | <b>100%</b> | <b>229.688.272.000</b> | <b>100%</b> |  |

**114,535 M**  
**(49,87%)**

## OVER VIEW PAGU ALOKASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA KPU TA 2017

| KUN           | URAIAN                                                                          | BELANJA OPERASIONAL KTR |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
|               |                                                                                 | Rp.                     |   |
| 1111          | Belanja Keperluan Perkantoran                                                   | 88.831.793.000          | 3 |
| 1115          | Honor Operasional Satuan Kerja                                                  | 34.565.760.000          | 1 |
| 1119          | Belanja Barang Operasional Lainnya                                              | 8.028.213.000           |   |
| 1211          | Belanja Bahan                                                                   | 189.933.000             |   |
| 1219          | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                          | 602.150.000             |   |
| 1811          | Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi                                 | 1.876.347.000           |   |
| 2111          | Belanja Langganan Listrik                                                       | 27.815.165.000          | 1 |
| 2121          | Belanja Jasa Pos dan Giro                                                       | 1.000.000.000           |   |
| 2141          | Belanja Sewa                                                                    | 17.331.914.000          |   |
| 2151          | Belanja Jasa Profesi                                                            | 1.900.000               |   |
| 2191          | Belanja Jasa Lainnya                                                            | 1.015.990.000           |   |
| 3111          | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                  | 11.995.418.000          | 4 |
| 3112          | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan                                          | 7.180.637.000           |   |
| 3119          | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya                          | 83.850.000              |   |
| 3121          | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                  | 38.188.459.000          | 1 |
| 3122          | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) serta Pelumas Khusus Non Pertamina | 224.519.000             |   |
| 3123          | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                      | 12.936.051.000          |   |
| 3129          | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          | 88.215.000              |   |
| 4111          | Belanja perjalanan biasa                                                        | 5.135.172.000           |   |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                 | <b>257.091.486.000</b>  |   |

## OVER VIEW PAGU ALOKASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA KPU TA 2017

| KUN    | URAIAN                                            | BELANJA MODAL  |     |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|-----|
|        |                                                   | Rp.            |     |
| 1211   | Belanja Bahan                                     | 57.600.000     |     |
| 1213   | Honor Output Kegiatan                             | 47.100.000     |     |
| 1811   | Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi   | 11.300.000     |     |
| 2191   | Belanja Jasa Lainnya                              | 100.000.000    |     |
| 4113   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 22.500.000     |     |
| 4114   | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 37.500.000     |     |
| 2111   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 27.827.680.000 | 8.  |
| 3111   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 4.060.320.000  | 1.  |
| 6111   | Belanja Modal Lainnya                             | 294.000.000    |     |
| JUMLAH |                                                   | 32.458.000.000 | 10. |

**KONDISI ANGGARAN  
DI SATKER KPU SE-JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN2017**

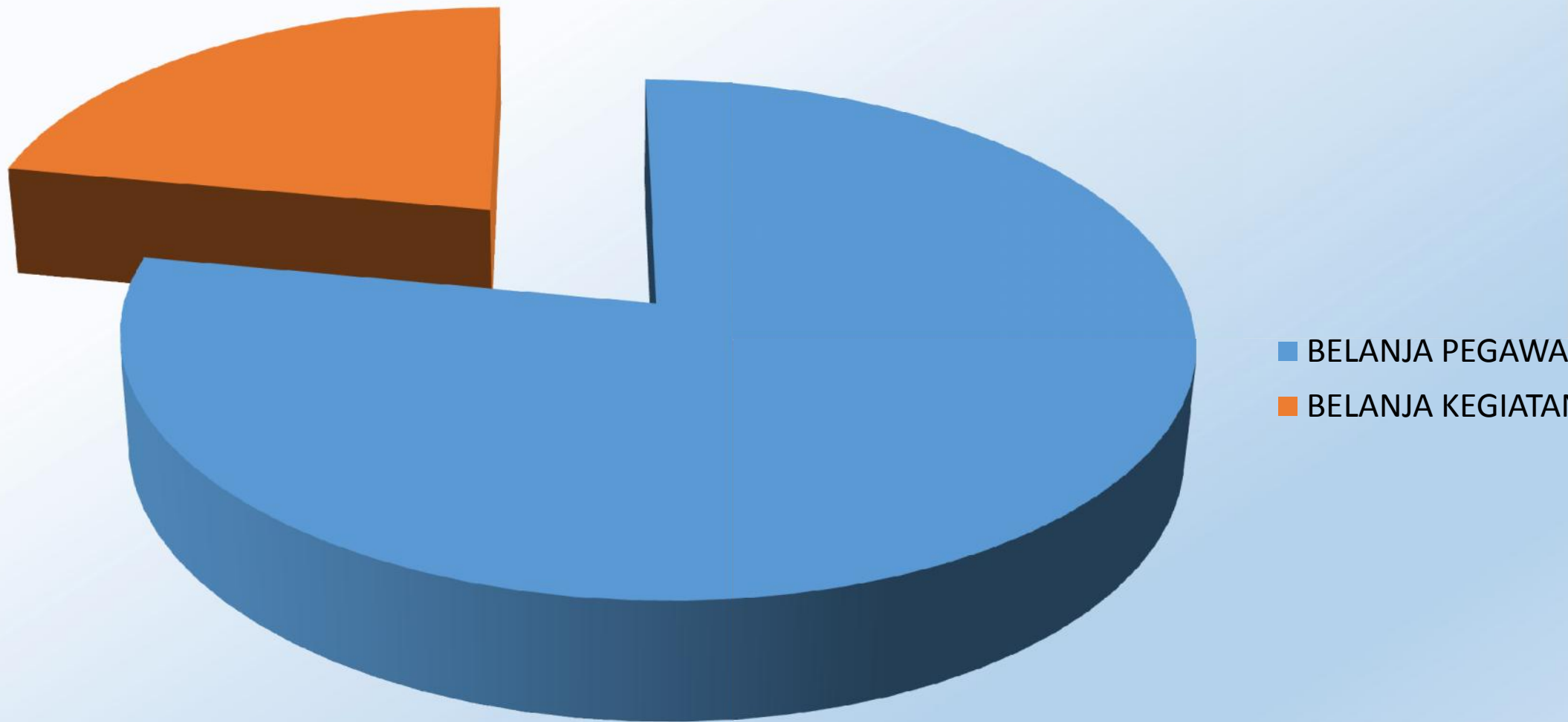
# PAGU ANGGARAN TH 2017 SE JATIM

| No.                       | Kode Satker | KAB/KOTA       | PAGU                   |
|---------------------------|-------------|----------------|------------------------|
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b> |             |                | <b>110.988.830.000</b> |
| 1                         | 654425      | PROVINSI JATIM | 8,023,863,000          |
| 2                         | 657825      | PACITAN        | 2,539,992,000          |
| 3                         | 657867      | PONOROGO       | 2,774,539,000          |
| 4                         | 657914      | TRENGGALEK     | 2,517,189,000          |
| 5                         | 657935      | TULUNGAGUNG    | 2,869,764,000          |
| 6                         | 657672      | BLITAR         | 2,394,282,000          |
| 7                         | 657736      | KEDIRI         | 2,842,814,000          |
| 8                         | 657782      | MALANG         | 2,462,050,000          |
| 9                         | 657757      | LUMAJANG       | 2,746,950,000          |
| 10                        | 657715      | JEMBER         | 2,621,789,000          |

|           |               |                    |                      |
|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| <b>11</b> | <b>657668</b> | <b>BANYUWANGI</b>  | <b>2,847,436,000</b> |
| <b>12</b> | <b>657693</b> | <b>BONDOWOSO</b>   | <b>2,499,010,000</b> |
| <b>13</b> | <b>657892</b> | <b>SITUBONDO</b>   | <b>2,841,132,000</b> |
| <b>14</b> | <b>657867</b> | <b>PROBOLINGGO</b> | <b>2,876,693,000</b> |
| <b>15</b> | <b>657846</b> | <b>PASURUAN</b>    | <b>2,638,868,000</b> |
| <b>16</b> | <b>657888</b> | <b>SIDOARJO</b>    | <b>3,139,540,000</b> |
| <b>17</b> | <b>657799</b> | <b>MOJOKERTO</b>   | <b>3,386,375,000</b> |
| <b>18</b> | <b>657722</b> | <b>JOMBANG</b>     | <b>3,060,335,000</b> |
| <b>19</b> | <b>657804</b> | <b>NGANJUK</b>     | <b>2,435,224,000</b> |
| <b>20</b> | <b>657761</b> | <b>MADIUN</b>      | <b>2,571,729,000</b> |
| <b>21</b> | <b>657778</b> | <b>MAGETAN</b>     | <b>2,669,116,000</b> |
| <b>22</b> | <b>657811</b> | <b>NGAWI</b>       | <b>2,781,368,000</b> |
| <b>23</b> | <b>657689</b> | <b>BOJONEGORO</b>  | <b>2,456,475,000</b> |
| <b>24</b> | <b>657921</b> | <b>TUBAN</b>       | <b>2,250,257,000</b> |
| <b>25</b> | <b>657740</b> | <b>LAMONGAN</b>    | <b>2,675,787,000</b> |

|    |        |                  |               |
|----|--------|------------------|---------------|
|    |        |                  |               |
| 26 | 657701 | GRESIK           | 2,822,697,000 |
| 27 | 657651 | BANGKALAN        | 2,835,740,000 |
| 28 | 657871 | SAMPANG          | 2,411,144,000 |
| 29 | 657832 | PAMEKASAN        | 2,681,282,000 |
| 30 | 657900 | SUMENEP          | 2,675,222,000 |
| 31 | 657977 | KOTA KEDIRI      | 2,500,347,000 |
| 32 | 657960 | KOTA BLITAR      | 2,045,778,000 |
| 33 | 657998 | KOTA MALANG      | 2,503,858,000 |
| 34 | 658021 | KOTA PROBOLINGGO | 2,693,506,000 |
| 35 | 658017 | KOTA PASURUAN    | 2,444,774,000 |
| 36 | 658000 | KOTA MOJOKERTO   | 2,486,328,000 |
| 37 | 657981 | KOTA MADIUN      | 2,671,592,000 |
| 38 | 657942 | KOTA SURABAYA    | 3,938,514,000 |
| 39 | 657956 | KOTA BATU        | 3,355,471,000 |
|    |        |                  |               |

## PERBANDINGAN BELANJA PEGAWAI & KEGIATAN



## Belanja Menurut Program

